

**MATRIKS KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG PERIODE 2016-2021 (MISI-1)**

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Rata-Rata Laju Pertumbuhan (GR)		Target Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Utama		
				GR (%)	Periode Waktu GR	2016	2017	2018	2019	2020	2021							
1. Meningkatnya Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan Kepada Seluruh Masyarakat	- Angka Partisipasi Sekolah																	
	a. SD Sederajat	%	99,82	0,70	Tahun 2010-2015	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
	b. SMP Sederajat	%	93,61	5,82	Tahun 2010-2015	97,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
	c. SMU Sederajat	%	56,24	6,35	Tahun 2010-2015	73,95	79,16	84,37	89,58	94,79	100,00	100,00						
	- Angka Partisipasi Murni																	
	a. SD Sederajat	%	97,52	0,91	Tahun 2010-2015	97,99	98,11	98,22	98,33	98,44	98,55	98,55						
	b. SMP Sederajat	%	76,59	7,44	Tahun 2010-2015	65,34	67,74	70,15	72,56	74,96	77,37	77,37						
	c. SMU Sederajat	%	48,09	7,17	Tahun 2010-2015	48,59	51,96	55,34	58,72	62,10	65,48	65,48						
	- Angka Partisipasi Kasar																	
	a. SD Sederajat	%	116,49	1,27	Tahun 2010-2015	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
	b. SMP Sederajat	%	86,55	6,46	Tahun 2010-2015	74,10	76,54	78,97	81,40	83,84	86,27	86,27						
	c. SMU Sederajat	%	55,30	0,75	Tahun 2010-2015	55,34	58,52	61,71	64,89	68,08	71,26	71,26						
	- Angka Melek Huruf	%	96,21	0,40	Tahun 2010-2015	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
	- Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,60	0,87	Tahun 2012-2015	8,29	8,53	8,76	9,00	9,58	10,16	10,16						
	- Indeks Pendidikan	Indeks	59,19	2,34	Tahun 2012-2015	60,42	61,68	62,97	64,28	65,62	66,99	66,99						
	- PDRB ADHB Sektor Jasa Pendidikan	Rp. Juta	679.765	13,49	Tahun 2013-2015	711.090	799.751	897.700	1.004.946	1.120.646	1.246.287	1.246.287						
	- PDRB ADHK Sektor Jasa Pendidikan	Rp. Juta	527.135	9,01	Tahun 2013-2015	573.644	623.856	678.668	738.511	803.097	873.572	873.572						
- Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Jasa Pendidikan	%	4,57	1,75	Tahun 2013-2015	4,67	4,78	4,89	5,00	5,11	5,23	5,23							
													- Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan					
													- Diarahkan Pada Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Dasar Pendidikan					
														Program Pendidikan Anak Usia Dini, Formal dan Informal	Urusan Pendidikan		DISDIKBUD	
														Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar/Menengah/Menengah	Urusan Pendidikan		DISDIKBUD	
														Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Urusan Pendidikan		DISDIKBUD	
														Program Peningkatan Layanan Pendidikan	Urusan Pendidikan		DISDIKBUD	
														Program Fasilitasi Pembiayaan Pendidikan	Urusan Pendidikan		DISDIKBUD	
														Program Peningkatan Kerjasama Pendidikan	Urusan Pendidikan		DISDIKBUD	

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Rata-Rata Laju Pertumbuhan (GR)		Target Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Utama
				GR (%)	Periode Waktu GR	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
														Program Sekolah Berstandar Nasional	Urusan Pendidikan	DISDIKBUD
														Program Pembudayaan Gemar Membaca	Urusan Perpustakaan	DPA
														Program Pembinaan dan Pelayanan Perpustakaan	Urusan Perpustakaan	DPA
2. Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Kesehatan Bagi Seluruh Masyarakat	- Angka Harapan Hidup	Tahun	63,51	0,45	Tahun 2012-2015	63,88	64,26	64,63	65,01	65,39	65,77	65,77				
	- Angka Kesakitan	%	29,87	-9,07	Tahun 2010-2015	27,97	26,20	24,53	22,97	21,51	20,15	20,15				
	- Rata-rata lama sakit	Hari	7,02	6,94	Tahun 2010-2015	6,32	5,69	5,12	4,61	4,15	3,73	3,73				
	- Persentasi Balita Gizi Buruk	%	1,33	4,64	Tahun 2010-2015	1,16	1,01	0,88	0,76	0,66	0,58	0,58				
	Indeks Angka Harapan Hidup /Indeks Kesehatan	Indeks	66,94	0,66	Tahun 2012-2015	67,22	67,50	67,78	68,06	68,34	68,62	68,62				
	- PDRB ADHB Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Rp. Juta	195.102	12,72	Tahun 2013-2015	253.612	279.817	308.122	338.382	370.174	403.858	403.858				
	- PDRB ADHK Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Rp. Juta	160.979	8,11	Tahun 2013-2015	173.723	187.356	202.120	218.112	235.212	253.722	253.722				
	- Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	%	3,61	1,60	Tahun 2013-2015	3,68	3,76	3,84	3,92	4,00	4,08	4,08				
	- Indeks Angka Harapan Hidup /Indeks Kesehatan	Indeks	66,94	0,66	Tahun 2012-2015	67,22	67,50	67,78	68,06	68,34	68,62	68,62				
														- Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan yang Terjangkau dan Berkualitas		
														- Diarahkan Pada Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar Kesehatan		
														Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Urusan Kesehatan	DINKES DAN RSUD
														Program Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Urusan Kesehatan	RSUD
														Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Urusan Kesehatan	RSUD
														Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Urusan Kesehatan	DINKES / RSUD
														Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Urusan Kesehatan	DINKES
														Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Urusan Kesehatan	DINKES

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Rata-Rata Laju Pertumbuhan (GR)		Target Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Utama
				GR (%)	Periode Waktu GR	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
														Program Pengembangan Sumberdaya Kesehatan	Urusan Kesehatan	DINKES / RSUD
														Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Urusan Kesehatan	DINKES
														Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Urusan Kesehatan	DINKES
														Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Urusan Kesehatan	DINKES
														Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Urusan Kesehatan	DINKES
3. Tertanggulangnya Kemiskinan dan Pengangguran yang Diprioritaskan Pada Kantong-kantong Kemiskinan dengan Memprioritaskan Pemberdayaan Masyarakat	- Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	124.410	-0,54	Tahun 2010-2015	112.388	109.050	105.811	102.668	99.619	96.421	96.421				
	- Persentasi Penduduk di bawah Garis Kemiskinan	%	10,43	-1,31	Tahun 2010-2015	8,81	8,45	8,10	7,77	7,45	7,13	7,13				
	- Tingkat Pengangguran Terbuka	%	10,22	-2,06	Tahun 2010-2015	9,08	8,83	8,57	8,32	8,06	7,08	7,08				
	- Indeks Tingkat Daya Beli / Pengeluaran	Indeks	62,27	0,67	Tahun 2012-2015	62,53	62,80	63,06	63,32	63,59	63,86	63,86				
	- Indeks Gini Rasio	Indeks	0,20	-1,89	Tahun 2005-2010	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17				
														- Penguatan dan perbaikan sosial		

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Rata-Rata Laju Pertumbuhan (GR)		Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Utama
				GR (%)	Periode Waktu GR	2016	2017	2018	2019	2020					
												- Diarahkan Pada Peningkatan Peran Lembaga dalam Pelayanan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Bagi Masyarakat Miskin Melalui Kartu Pandeglang Berkah yang Mencakup Pelayanan Berobat Gratis dan Beasiswa, Tunjangan Kelahiran Berupa Bantuan Kotak Bayi Berkah dan Tunjangan Kematian, Rehab Rumah Masyarakat Tidak Layak Huni, Ketahanan Pangan Keluarga Miskin, Peduli Teman di Sekolah, dan Peduli Keluarga Binaan			
												- Diarahkan pada pembinaan bagi PSKS, lembaga kesos dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta peningkatan nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial			
												- Diarahkan pada Pembinaan dan Bantuan Sosial Kepada PMKS Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Serta Pemberdayaan agar Mampu Mewujudkan Kemandirian			
													Program Penanggulangan Kemiskinan	Urusan Sosial	DINSOS/ DISNAKERTRANS
													Program Sarana dan Prasarana Sosial	Urusan Sosial	DINSOS/ DISNAKERTRANS
													Program Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS	Urusan Sosial	DINSOS/ DISNAKERTRANS
													Program Pengentasan Desa Tertinggal	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DPMPD

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Rata-Rata Laju Pertumbuhan (GR)		Target Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Utama	
				GR (%)	Periode Waktu GR	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
													- Peningkatan Kemampuan dan Kemandirian Masyarakat dan Perekonomian				
													- Diarahkan pada Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat yang Bersifat Partisipatif, Peningkatan Kelembagaan yang Dilaksanakan Secara Swakelola dan Berkelanjutan				
														Program Pemberdayaan Masyarakat	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		DPMPD
														Program Pemberdayaan Ekonomi	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		DPMPD/SETDA
4. Meningkatkan Fungsi Serta Sarana dan Prasarana Perdagangan dan Pasar	- Tingkat Inflasi	%	5,13	9,09	Tahun 2013-2015	8,00	8,10	8,20	8,25	8,30	8,40	8,40					
	- PDRB ADHB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Rp. Juta	2.208.351	7,58	Tahun 2013-2015	2.673.047	2.910.810	3.163.502	3.428.916	3.702.203	3.986.461	3.986.461					
	- PDRB ADHB Sektor Jasa Perusahaan	Rp. Juta	45.984	11,16	Tahun 2013-2015	242.025	281.486	326.738	378.249	436.184	501.633	501.633					
	- PDRB ADHK Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Rp. Juta	1.975.749	4,68	Tahun 2013-2015	2.064.566	2.155.995	2.252.151	2.353.281	2.457.320	2.566.666	2.566.666					
	- PDRB ADHK Sektor Jasa Perusahaan	Rp. Juta	38.803	6,65	Tahun 2013-2015	41.312	43.955	46.781	49.803	52.986	56.387	56.387					
	- Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	3,82	-1,12	Tahun 2013-2015	3,79	3,76	3,73	3,71	3,68	3,65	3,65					
	- Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Jasa Perusahaan	%	0,94	-3,74	Tahun 2013-2015	0,91	0,89	0,87	0,84	0,82	0,80	0,80					
														- Penguatan dan Perbaikan Perdagangan dan Pasar			
														- Diarahkan Pada Penyiapan Pasar Sehat Melalui Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat			
														- Diarahkan pada Penciptaan Sistem Logistik yang Efisien Untuk Menjaga Kelancaran Distribusi Bahan Pokok			

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Rata-Rata Laju Pertumbuhan (GR)		Target Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Utama
				GR (%)	Periode Waktu GR	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
													- Diarahkan pada Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Resi Gudang (SRG) Sebagai Sarana Efisiensi Distribusi dan Alternatif Pembiayaan			
														Program Penyediaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Perekonomian	Urusan Pekerjaan Umum	DPPKP/ DINKOP UMKM / DISPERINDAG ESDM
														Program Peningkatan Efisiensi Sistem dan Distribusi Logistik	Urusan Perdagangan	DINKOP UMKM / DISPERINDAG ESDM
													- Diarahkan Pada Peningkatan Upaya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Melalui Gerakan Konsumen Cerdas dan Tertib Ukur Melalui Pelayanan Tera/ Tera Ulang serta Pengawasan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)			
														Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Urusan Perdagangan	DINKOP UMKM / DISPERINDAG ESDM
													- Diarahkan pada Peningkatan Penggunaan dan Perdagangan Produk Dalam Negeri Melalui Peningkatan Peran Pedagang Mikro, Kecil, dan Menengah (PMKM) dalam Mewujudkan Penciptaan			
														Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Urusan Perdagangan	DINKOP UMKM / DISPERINDAG ESDM
5. Meningkatnya Implementasi Norma Agama	- Jumlah Fasilitas/ Bantuan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keagamaan	Lembaga / Organisasi	-	-	-	172	179	100	100	100	100	751				

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Rata-Rata Laju Pertumbuhan (GR)		Target Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Utama	
				GR (%)	Periode Waktu GR	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
	- Tidak Terjadinya Konflik Umat Beragama Skala Provinsi dan Nasional	Kali	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	- Jumlah Pembinaan, Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama	Kali	-	-	-	91	91	91	91	91	91	91	546				
	- Angka Partisipasi Sekolah MI / SD Sederajat	%	99,82	0,70	Tahun 2010-2015	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
	- Angka Partisipasi Murni MI / SD Sederajat	%	97,52	0,91	Tahun 2010-2015	97,99	98,11	98,22	98,33	98,44	98,55	98,55					
	- Angka Partisipasi Kasar MI / SD Sederajat	%	116,49	1,27	Tahun 2010-2015	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
	- Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,60	0,87	Tahun 2012-2015	8,29	8,53	8,76	9,00	9,58	10,16	10,16					
	- Indeks Pendidikan	Indeks	59,19	2,34	Tahun 2012-2015	60,42	61,68	62,97	64,28	65,62	66,99	66,99					
														- Meningkatkan Fasilitas Kegiatan Keagamaan, Pembinaan Kelembagaan Keagamaan dan Kehidupan Beragama			
														- Diarahkan pada Optimalisasi Madrasah Diniyah Sebagai Pondasi Tauhid dan Akhlaq			
														- Diarahkan pada Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Kehidupan Beragama			
															Program Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan Keagamaan, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Penunjang Urusan Pemerintahan	SETDA
															Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Penunjang Urusan Pemerintahan	SETDA
															Program Peningkatan Kualitas, Peran dan Fungsi Ulama dan Santri	Penunjang Urusan Pemerintahan	SETDA
															Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan	Penunjang Urusan Pemerintahan	SETDA
6. Meningkatnya Kapasitas Pemuda Berprestasi dan Sarana Olahraga	- Juara Olahraga Tingkat Provinsi / Nasional	Cabang	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	15				
	- Pembangunan dan Pemanfaatan GOR Multiguna Sebagai Gedung Pemuda dan Pusat Kreasi dan Inovasi Pemuda	Unit	3	-	-	-	2	2	2	2	2	2	10				
	- Jumlah Penerima Penghargaan Kepemudaan dan Keolahragaan	Penghargaan	-	-	-	-	5	5	5	5	5	5	25				

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Rata-Rata Laju Pertumbuhan (GR)		Target Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Utama	
				GR (%)	Periode Waktu GR	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
	- Jumlah Fasilitasi Pengembangan Pemuda dan Pusat Kreasi dan Inovasi Pemuda	Fasilitasi / Kegiatan	-	-	-	11	15	20	20	20	20	175					
	- Jumlah Fasilitasi Olahraga					2	5	8	11	11	11	175					
													- Peningkatan Kualitas, Kuantitas, Pembinaan Olahraga dan Sarana Prasarana Olahraga				
													- Diarahkan pada Pelatihan dan Pembinaan Keolahragaan				
														Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Urusan Pemuda dan Olahraga		DISPORA
														Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Urusan Pemuda dan Olahraga		DISPORA
													- Diarahkan pada Fasilitasi Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga pada Setiap Kecamatan				
														Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Urusan Pemuda dan Olahraga		DISPORA
													- Peningkatan Partisipasi Pemuda dalam Berbagai Bidang Pembangunan				
													- Diarahkan pada Peningkatan Partisipasi dan Peran Aktif Pemuda dalam Gerakan Kepemudaan serta Pengembangan Jiwa Kewirausahaan dan Kreativitas Pemuda				
													- Diarahkan pada Pembangunan dan Pemanfaatan GOR Multiguna Sebagai Gedung Pemuda dan Pusat Kreasi dan Inovasi Pemuda				
														Program Peningkatan Peran Serta Pemuda	Urusan Pemuda dan Olahraga		DISPORA
														Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Urusan Pemuda dan Olahraga		DISPORA

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Rata-Rata Laju Pertumbuhan (GR)		Target Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Utama	
				GR (%)	Periode Waktu GR	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
7. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	%	100,00	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
	- Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di PUSKESMAS mampu Tatalaksana KIPIA dan PPT/PKT di RS	%	100,00	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
	- Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	%	35,29	-	-	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	100,00	100,00					
	- Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Diberikan oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	%	17,65	-	-	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	100,00	100,00					
	- Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	%	100,00	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
	- Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	%	-	-	-	70,00	76,00	82,00	88,00	94,00	100,00	100,00					
	- Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	%	-	-	-	70,00	76,00	82,00	88,00	94,00	100,00	100,00					
	- Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	%	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
													- Pengarusutamaan Gender				
													- Diarahkan pada Peningkatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan				
													Program Pengarusutamaan Gender	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DP2KBP3A	
													Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DP2KBP3A	
													Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		DPMPD	
													- Diarahkan pada Peningkatan, Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan dan Diskriminasi serta Terlindunginya Hak-hak Anak				

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Rata-Rata Laju Pertumbuhan (GR)		Target Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Utama
				GR (%)	Periode Waktu GR	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
														Program Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP2KBP3A
8. Terkendalinya Angka Kelahiran dengan Meningkatkan Kualitas Reproduksi	- Jumlah Penduduk	Jiwa	1.194.911	0,78	Tahun 2010-2015	1.275.363	1.290.719	1.306.027	1.321.281	1.336.476	1.351.525	1.351.525				
	- Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,55	0,78	Tahun 2010-2015	1,22	1,20	1,19	1,17	1,15	1,13	1,13				
	- Jumlah Rumah Tangga	KK	281.359	0,61	Tahun 2010-2015	364.327	370.229	376.226	382.321	388.515	393.682	393.682				
	- Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya dibawah Usia 20 tahun 3,5%	%	100,00	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
	- Cakupan Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 65%.	%	100,00	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
	- Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber- KB tidak Terpenuhi (Unmet Need) 5%	%	100,00	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
	- Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber- KB 70%	%	100,00	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
	- Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%	%	91,00	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
	- Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan	%	5,84	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
	- Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/ Kelurahan.	%	100,00	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
	- Cakupan Penyediaan Alat dan Obat untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat 30% Setiap Tahun	%	100,00	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
	- Data Mikro Kelurga di setiap Desa/Kelurahan 100% di Setiap Tahun	%	100,00	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
														- Perluasan Informasi Ddukasi dan Pelayanan Kontrasepsi KB/KR		
														- Diarahkan kepada Peningkatan Peran Serta Masyarakat Terhadap Penggunaan KB/KR Mandiri		
														Program Keluarga Berencana	Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	DP2KBP3A
														Program Ketahanan Keluarga	Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	DP2KBP3A
														Program Pemberdayaan Keluarga	Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	DP2KBP3A
														Program Advokasi dan KIE Keluarga Sejahtera	Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	DP2KBP3A

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Rata-Rata Laju Pertumbuhan (GR)		Target Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Utama
				GR (%)	Periode Waktu GR	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
														Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB-KR	Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	DP2KBP3A
9. Meningkatnya Pemberdayaan Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah	- Terselenggaranya Fasilitas Pemerintah Daerah dalam Rangka Kerjasama Kemitraan Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) Tingkat Kabupaten/Kota dengan Pengusaha Tingkat Provinsi/ Nasional	1 kali / tahun	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1				
	- PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan	Rp. Juta	1.188.021	6,01	Tahun 2013-2015	7.382.438	8.012.362	8.678.972	9.375.847	10.089.447	10.827.996	10.827.996				
	- PDRB ADHB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Rp. Juta	2.208.351	7,58	Tahun 2013-2015	2.673.047	2.910.810	3.163.502	3.428.916	3.702.203	3.986.461	3.986.461				
	- PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan	Rp. Juta	1.048.398	4,26	Tahun 2013-2015	1.091.190	1.135.001	1.180.927	1.229.069	1.278.325	1.329.921	1.329.921				
	- PDRB ADHK Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Rp. Juta	1.975.749	4,68	Tahun 2013-2015	2.064.566	2.155.995	2.252.151	2.353.281	2.457.320	2.566.666	2.566.666				
	- Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Industri Pengolahan	%	0,74	-0,50	Tahun 2013-2015	0,74	0,74	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73				
	- Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	3,82	-1,12	Tahun 2013-2015	3,79	3,76	3,73	3,71	3,68	3,65	3,65				
	- Indeks Tingkat Daya Beli / Pengeluaran	Indeks	62,27	0,67	Tahun 2012-2015	62,53	62,80	63,06	63,32	63,59	63,86	63,86				
														- Peningkatan Kualitas, Penciptaan Iklim Usaha, Pengembangan Kewirausahaan dan Sistem Pendukung Koperasi Serta Pengusaha UMKM		
														- Diarahkan pada Peningkatan Peranan Koperasi dan Pengusaha UMKM Bidang Pertanian dan Jasa Pariwisata Serta Usaha Pendukungnya		
														Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DINKOP UMKM / DISPERINDAG ESDM
														Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DINKOP UMKM / DISPERINDAG ESDM
														Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DINKOP UMKM / DISPERINDAG ESDM

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Rata-Rata Laju Pertumbuhan (GR)		Target Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Utama
				GR (%)	Periode Waktu GR	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
														Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DINKOP UMKM / DISPERINDAG ESDM
10. Meningkatnya Etos Kerja dan Produktivitas Masyarakat	- Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	56,18	-	-	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
	- Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	%	100,00	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
	- Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	%	100,00	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
	- Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang ditempatkan	%	20,73	-	-	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00				
	- Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	100,00	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
	- Besaran Pekerja/buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	%	86,70	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
	- Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	31,25	-	-	45,00	56,00	67,00	78,00	89,00	100,00	100,00				
	- Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	%	11,00	-	-	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00				
														- Penyelenggaraan Pelatihan dan Lathan Serta Pembinaan		
														- Diarahkan pada Pelatihan Ketenagakerjaan Berbasis Kompetensi, Pemberdayaan Masyarakat serta Pembinaan bagi Pelaku Usaha di Bidang Ketenagakerjaan		
														- Diarahkan pada Fasilitasi Penyiapan, Pengerahan dan Pembinaan Transmigrasi yang Berdaya Saing di Lokasi Transmigran		
														Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Urusan Ketenagakerjaan	DINSOS/ DISNAKERTRANS
														Program Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Urusan Ketenagakerjaan	DINSOS/ DISNAKERTRANS
														Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Urusan Ketenagakerjaan	DINSOS/ DISNAKERTRANS
														Program Fasilitasi Transmigrasi	Urusan Ketenagakerjaan	DINSOS/ DISNAKERTRANS

**MATRIKS KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG PERIODE 2016-2021 (MISI-2)**

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Rata-Rata Laju Pertumbuhan (GR)		Target Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Utama	
				GR (%)	Periode Waktu GR	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
1. Terlaksananya Fasilitas dan Koordinasi Untuk Mendorong dan Membangun Konektivitas Wilayah	- PDRB ADHB Sektor Transportasi dan Perdagangan	Rp. Juta	1.184.189	15,15	Tahun 2013-2015	2.657.850	3.400.762	4.342.791	5.530.906	7.016.785	8.877.772	8.877.772					
	- PDRB ADHK Sektor Transportasi dan Perdagangan	Rp. Juta	981.790	7,92	Tahun 2013-2015	1.057.651	1.138.644	1.226.209	1.320.893	1.421.943	1.531.146	1.531.146					
	- Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Transportasi dan Perdagangan	%	2,42	-11,72	Tahun 2013-2015	2,22	2,04	1,87	1,72	1,58	1,45	1,45					
	- Tersedianya Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Telah Tersedia Jaringan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	%	3,10	80,00	-	80,00	84,00	88,00	92,00	96,00	100,00	100,00					
	- Tersedianya Angkutan Umum yang Melayani Jaringan Trayek yang Menghubungkan Daerah Tertinggal dan Terpencil dengan Wilayah yang Telah Berkembang pada Wilayah yang telah Tersedia Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	%	-	70,00	-	70,00	76,00	82,00	88,00	94,00	100,00	100,00					
	- Tersedianya Halte pada Setiap Kabupaten/Kota yang Telah dilayani Angkutan Umum dalam Trayek	%	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
	- Tersedianya Terminal Angkutan Penumpang pada Setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani Angkutan Umum dalam Trayek	%	13,79	-	-	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00					
	- Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka dan Guardrail) dan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada Jalan Kabupaten/Kota	%	100,00	-	-	70,00	76,00	82,00	88,00	94,00	100,00	100,00					
	- Tersedianya Kapal Laut yang Beroperasi pada Lintas atau Trayek dalam Kabupaten/Kota untuk Menghubungkan Daerah Tertinggal dan Terpencil dengan Wilayah yang telah Berkembang pada Wilayah yang Memiliki Alur Pelayaran dan tidak ada Alternatif Angkutan Jalan	%	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
	- Tersedianya Dermaga pada setiap Ibukota Kecamatan dalam Kabupaten/kota untuk Melayani Kapal Laut yang Beroperasi pada Trayek dalam Kabupaten/Kota pada Wilayah yang Memiliki Alur Pelayaran dan tidak ada Alternatif Angkutan Jalan	%	-	-	-	70,00	76,00	82,00	88,00	94,00	100,00	100,00					
	- Rasio Elektrifikasi	%	90,00	5,43	Tahun 2010-2015	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
	- PDRB ADHB Sektor Pertambangan & Penggalian	Rp. Juta	2.244.627	9,10	Tahun 2013-2015	168.863	173.077	177.049	180.627	183.563	186.042	186.042					
	- PDRB ADHB Sektor Listrik dan Gas	Rp. Juta	114.391	48,04	Tahun 2013-2015	735.207	969.667	1.276.386	1.675.622	2.191.213	2.857.703	2.857.703					
	- PDRB ADHK Sektor Pertambangan & Penggalian	Rp. Juta	1.547.205	6,25	Tahun 2013-2015	1.641.032	1.739.434	1.844.292	1.956.042	2.073.185	2.197.950	2.197.950					
	- PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan	Rp. Juta	1.048.398	4,26	Tahun 2013-2015	1.091.190	1.135.001	1.180.927	1.229.069	1.278.325	1.329.921	1.329.921					
	- Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertambangan & Penggalian	%	57,91	2,25	Tahun 2013-2015	59,61	61,35	63,15	65,00	66,90	68,86	68,86					
	- Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Industri Pengolahan	%	0,74	-0,50	Tahun 2013-2015	0,74	0,74	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73					
													- Fasilitas dan Koordinasi Konektivitas Simpul Transportasi Pusat Kota dan Pusat Kegiatan Strategis				

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Rata-Rata Laju Pertumbuhan (GR)		Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Utama
				GR (%)	Periode Waktu GR	2016	2017	2018	2019	2020					
												- Diarahkan untuk Mendorong Pelebaran Jalan Pasar Pandeglang - Perbatasan Baros (Gayam)			
												- Pengurangan Ketimpangan Pembangunan antar Wilayah			
												- Diarahkan untuk Mendorong untuk Terbangunnya Jalan Tol Serang - Panimbang			
												- Fasilitasi dan Kordinasi Revitalisasi Sistem Transportasi Massal			
												- Diarahkan untuk Mendorong Terlaksananya Reaktivasi Jalur KA Rangkasbitung - Labuan			
												- Diarahkan untuk Mendorong Percepatan terlaksananya Reaktivasi Jalur KA Saketi – Bayah			
												- Diarahkan untuk Mendorong Terbangunnya Pelabuhan Regional Cikeusik			
												- Diarahkan untuk Mendorong Terbangunnya Pelabuhan Kapal Pesiar di KEK Tj. Lesung			
												- Diarahkan untuk Mendorong Terbangunnya Bandara Banten Selatan			
													Peningkatan Pelayanan Perhubungan	Urusan Perhubungan	DISHUB
												- Kordinasi dan Fasilitasi Pemanfaatan Energi serta Percepatan Pemenuhan Suplai Listrik untuk Memenuhi Kebutuhan Domestik/Masyarakat			

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Rata-Rata Laju Pertumbuhan (GR)		Target Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Utama
				GR (%)	Periode Waktu GR	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
													- Diharapkan untuk Mewujudkan Terpenuhinya Kebutuhan Energi Listrik bagi Seluruh Wilayah Penduduk Pandeglang			
														Program Koordinasi dan Fasilitasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Urusan Energi dan Sumber Daya Air	BAPPEDA/ DISHUB/ DISPERINDAG ESDM
2. Terlaksananya Pembangunan dan Penataan, Fasilitasi dan Koordinasi untuk Menjadikan Aktivitas Perekonomian Lancar	- Media Massa Seperti Majalah, Radio dan Televisi	kegiatan	12,00	-	-	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00				
	- Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media Baru seperti Website (media online)	hari	365,00	-	-	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00				
	- Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media Tradisional Seperti Pertunjukan Rakyat	kegiatan	1,00	-	-	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00				
	- Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media Interpersonal seperti Sarasehan, Ceramah/Diskusi dan Lokakarya	kegiatan	10,00	-	-	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00				
	- Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media Luar Ruang Seperti Buletin, Leaflet, Booklet, Brosur, Spanduk dan Baliho	kegiatan	12,00	-	-	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00				
	- Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi di Tingkat Kecamatan	%	23,00	-	-	70,00	76,00	82,00	88,00	94,00	100,00	100,00				
	- Persentase Tersedianya Air Irigasi untuk Pertanian Rakyat pada Sistem Irigasi yang Sudah Ada Sesuai dengan Kewenangannya	%	67,50	-	-	68,13	68,75	69,38	70,00	70,63	71,25	71,25				
	- PDRB ADHB Sektor Informasi dan Komunikasi	Rp. Juta	61.827	7,63	Tahun 2013-2015	788.795	864.926	946.545	1.033.089	1.123.179	1.217.823	1.217.823				
	- PDRB ADHK Sektor Informasi dan Komunikasi	Rp. Juta	69.715	10,37	Tahun 2013-2015	76.813	84.579	93.159	102.639	113.008	124.460	124.460				
	- Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Informasi dan Komunikasi	%	0,37	-3,61	Tahun 2013-2015	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31	0,31				
													- Pembangunan dan Penataan Jaringan Transportasi, Sarana dan Prasarana Informasi dan Komunikasi Melalui Koordinasi dan Peningkatan Kerjasama Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan Swasta			

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Rata-Rata Laju Pertumbuhan (GR)		Target Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Utama
				GR (%)	Periode Waktu GR	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
													- Diarahkan pada Pembangunan dan Peningkatan Teknologi Informasi, Potensi Daerah, Data Informasi Pembangunan Serta Penetapan E Government			
													- Diarahkan pada Pembangunan Wi-fi / Hotspot pada Setiap Kecamatan			
													- Diarahkan untuk Menyiapkan Pusat Layanan Petani dan Nelayan (Call Centre / SMS Centre)			
														Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Urusan Komunikasi dan Informatika / Urusan Persandian	DISHUB / DISKOMINFO SS
													- Peningkatan Efektivitas dan Ketersambungan Jaringan Irigasi dan Sumber Air			
													- Mendorong Terbangunnya Bendungan untuk DAS Ciliman dan Cilemer yang Berfungsi Sebagai Waduk Penyedia Air, Pengendali Banjir, dan Sumber PLTA			
														Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan Pengairan Lainnya	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PU & PR
3. Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana Khususnya Jalan Menuju Kawasan Agribisnis, Destinasi Pariwisata dan Pusat Pemerintahan Kecamatan	- Kondisi jalan															
	a. Baik	%	29.11	14.23	Tahun 2010-2015	32.80	36.71	40.80	45.00	49.28	53.55	53.55				
	b. Sedang	%	34.02	-1.97	Tahun 2010-2015	32.72	31.26	29.66	27.93	26.11	24.22	24.22				

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Rata-Rata Laju Pertumbuhan (GR)		Target Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Utama	
				GR (%)	Periode Waktu GR	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
	c. Buruk	%	15,78	-3,10	Tahun 2010-2015	15,01	14,19	13,31	12,40	11,46	10,52	10,52					
	d. Rusak Berat	%	21,09	-6,16	Tahun 2010-2015	19,46	17,84	16,23	14,67	13,15	11,71	11,71					
	- PDRB ADHB Sektor Transportasi dan Pergudangan	Rp. Juta	1.184.189,46	15,15	Tahun 2013-2015	2.657.849,58	3.400.761,81	4.342.791,43	5.530.906,12	7.016.785,14	8.877.771,57	8.877.771,57					
	- PDRB ADHK Sektor Transportasi dan Pergudangan	Rp. Juta	981.789,83	7,92	Tahun 2013-2015	1.057.650,62	1.138.644,16	1.226.208,79	1.320.892,61	1.421.942,72	1.531.145,80	1.531.145,80					
	- Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Transportasi dan Pergudangan	%	2,42	-11,72	Tahun 2013-2015	2,22	2,04	1,87	1,72	1,58	1,45	1,45					
	- Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten/Kota Baik dan Sedang	%	63,13	3,74	Tahun 2010-2015	65,53	67,98	70,46	72,93	75,38	77,77	77,77					
	- Persentase Terhubungnya Pusat-pusat Kegiatan dan Pusat Produksi di Wilayah Kabupaten/Kota	%	60,00	-	-	60,00	70,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
	- PDRB ADHB Sektor Bangunan	Rp. Juta	1.001.813	13,78	Tahun 2013-2015	2.406.561	2.848.230	3.364.343	3.963.328	4.650.871	5.442.926	5.442.926					
	- PDRB ADHK Sektor Bangunan	Rp. Juta	835.302	8,76	Tahun 2013-2015	906.914	984.036	1.068.036	1.159.546	1.258.060	1.365.320	1.365.320					
	- Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	3,82	-1,12	Tahun 2013-2015	3,79	3,76	3,73	3,71	3,68	3,65	3,65					
													- Terwujudnya Sinergi antara Program Pembangunan Infrastruktur yang Merjadi Kewenangan Pusat, Propinsi dan Kabupaten				
													- Diarahkan pada Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Pertanian, Pariwisata Serta Aksesibilitas Perdesaan				
														Program Pembangunan/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		DINAS PU & PR
														Program Penyediaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang ke-PU-an	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		DINAS PU & PR
4. Terlaksananya Optimalisasi Fungsi Kawasan, Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Serta Pelestarian Lingkungan Hidup	- Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman	%	48,91	-	-	55,61	63,24	71,91	81,77	92,98	100,00	100,00					
	- Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Air Limbah yang Memadai	%	36,00	-	-	40,90	46,48	52,81	60,00	68,17	77,46	77,46					
	- Persentase Pengurangan Sampah di Perkotaan	%	11,00	-	-	12,77	14,83	17,22	20,00	23,22	26,97	26,97					
	- Persentase Pengangkutan Sampah	%	43,00	-	-	48,57	54,86	61,97	70,00	79,07	89,31	89,31					
	- Persentase pengoperasian TPA	%	43,00	-	-	48,57	54,86	61,97	70,00	79,07	89,31	89,31					

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Rata-Rata Laju Pertumbuhan (GR)		Target Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Utama	
				GR (%)	Periode Waktu GR	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
	- Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase Skala Kota Sehingga Tidak Terjadi Genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) Lebih dari 2 Kali Setahun	%	29,00	-	-	33,23	38,08	43,63	50,00	57,29	65,65	65,65					
		%	29,00	-	-	33,23	38,08	43,63	50,00	57,29	65,65	65,65					
	- Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang Diterbitkan	%	36,00	-	-	40,90	46,48	52,81	60,00	68,17	77,46	77,46					
	- Persentase Berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	%		-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	- Persentase Tersedianya 7 (tujuh) Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	%	36,00	-	-	40,90	46,48	52,81	60,00	68,17	77,46	77,46					
	- Persentase Tersedianya Layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu Penerbitan Paling Lama 10 (Sepuluh) Hari Kerja Setelah Persyaratan Lengkap	%	58,00	-	-	66,46	76,16	87,27	100,00	100,00	100,00	100,00					
	- Persentase Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog dan Peta Digital	%	100,00	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
	- Persentase Tersedianya Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	%	40,00	-	-	42,29	44,72	47,29	50,00	52,87	55,90	55,90					
	- PDRB ADHB Sektor Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Rp. Juta	11.390	10,53	Tahun 2013-2015	16.912	18.361	19.896	21.501	23.146	24.849	24.849					
	- PDRB ADHK Sektor Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Rp. Juta	10.827	6,97	Tahun 2013-2015	11.561	12.337	13.169	14.061	15.004	16.014	16.014					
	- Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	%	3,11	1,19	Tahun 2013-2015	3,16	3,21	3,25	3,31	3,36	3,41	3,41					
														- Konsistensi Pendayagunaan Rencana Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Serta Pelestarian Lingkungan Hidup			
														- Diarahkan pada penyelenggaraan penataan ruang untuk sektor unggulan daerah yang didukung oleh manajemen pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan hidup			
															Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pendialian pemanfaatan Tata Ruang	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	BAPPEDA/ DPPKP
															Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)	Urusan Lingkungan Hidup	DLHKK

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Rata-Rata Laju Pertumbuhan (GR)		Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Utama
				GR (%)	Periode Waktu GR	2016	2017	2018	2019	2020					
													Program Pengendalian Pencemaran dan Kualitas Lingkungan Hidup	Urusan Lingkungan Hidup	DLHKK
													Program Pengelolaan dan Pemeliharaan Taman Kota serta Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Urusan Lingkungan Hidup	DLHKK
													Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Urusan Lingkungan Hidup	DLHKK
													Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	DPPKP/DINKOP UMKM / DISPERINDAG ESDM /BAPPEDA
												- Penyediaan Air minum, Penanganan persampahan, dan air limbah serta pengelolaan sanitasi lingkungan dengan penguatan kerjasama antara Pemerintah dengan dunia usaha			
													- Diharapkan pada percepatan pembangunan, peningkatan kualitas dan kuantitas permukiman serta penataan permukiman melalui stimulus pemerintah pusat dan daerah dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat termasuk dunia usaha		
													Program AMPL (Air Minum dan Kesehatan Lingkungan)	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	DPPKP/BAPPEDA/D LHKK

**MATRIKS KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG PERIODE 2016-2021 (MISI-3)**

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Rata-Rata Laju Pertumbuhan (GR)		Target Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Utama
				GR (%)	Periode Waktu GR	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
1. Tercapainya ketersediaan, dan Peningkatan produktivitas dan mutu produk unggulan pertanian	- PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Rp. Juta	6.868.630	10,54	Tahun 2013-2015	1.382.532	1.573.590	1.787.538	2.025.132	2.285.419	2.572.186	2.572.186				
	- PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Rp. Juta	5.062.493	2,72	Tahun 2013-2015	5.191.009	5.319.382	5.452.570	5.590.722	5.728.569	5.871.434	5.871.434				
	- Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	24,04	-1,54	Tahun 2013-2015	23,78	23,52	23,27	23,01	22,77	22,52	22,52				
	- Nilai Tukar Petani	Indeks	-	-	-	102,32	102,46	102,60	102,75	102,89	103,04	103,04				
													- Mengembangkan kawasan produksi pertanian			
													- Diarahkan pada peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk unggulan pertanian berbasis pasar			
														Program Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian berkelanjutan	Urusan Pertanian	DISTAN
													- Menyediakan Sarana dan Prasarana Pertanian			
													- Diarahkan pada perbaikan mutu intensifikasi, perluasan areal, perbaikan jaringan irigasi tani			
													- Diarahkan pada penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian			
													- Diarahkan pada pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan usaha tani dan irigasi tani			
														Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian	Urusan Pertanian	DISTAN/ DINAS PU & PR
													- Diarahkan pada Perlindungan Tanaman, Hewan dan Masyarakat Veteriner			

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Rata-Rata Laju Pertumbuhan (GR)		Target Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Utama
				GR (%)	Periode Waktu GR	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
														Program Perlindungan Tanaman, Hewan dan Masyarakat Veteriner	Urusan Pertanian	DISTAN
2. Meningkatkan Jaringan Kelembagaan dan Investasi Industri Pertanian	- PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Rp. Juta	6.868.630	10,54	Tahun 2013-2015	1.382.532	1.573.590	1.787.538	2.025.132	2.285.419	2.572.186	2.572.186				
	- PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Rp. Juta	5.062.493	2,72	Tahun 2013-2015	5.191.009	5.319.382	5.452.570	5.590.722	5.728.569	5.871.434	5.871.434				
	- Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	24,04	-1,54	Tahun 2013-2015	23,78	23,52	23,27	23,01	22,77	22,52	22,52				
	- Nilai Tukar Petani	Indeks	-	0,00	-	102,32	102,46	102,60	102,75	102,89	103,04	103,04				
	- PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan	Rp. Juta	1.188.021	6,01	Tahun 2013-2015	7.382.438	8.012.362	8.678.972	9.375.847	10.069.447	10.827.996	10.827.996				
	- PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan	Rp. Juta	1.048.398	4,26	Tahun 2013-2015	1.091.190	1.135.001	1.180.927	1.229.069	1.278.325	1.329.921	1.329.921				
	- Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Industri Pengolahan	%	0,74	-0,50	Tahun 2013-2015	0,74	0,74	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73				
														- Meningkatkan jaringan, kelembagaan dan investasi industri pertanian		
														- Diarahkan untuk mendirikan Pusat Agribisnis		
														- Diarahkan pada pendirian Pusat Distribusi Agro		
														Program Perluasan Jaringan Bisnis dan Pasar Produk Pertanian	Urusan Pertanian	DISTAN/DPPKP
														Program Pembangunan/ Pengembangan sentra Industri/usaha potensial	Urusan Industri	DISKOP & UMKM / DISPERINDAG ESDM
														- Diarahkan pada Pendirian/pembentukan pusat pelatihan agro bisnis		
														Program Pembangunan Pusat Pelatihan Pertanian	Urusan Pertanian	DPKK/ DISTAN
														- Diarahkan pada pengembangan, kelembagaan, SDM dan penyuluhan		
														Program Pengembangan Kelembagaan, SDM dan Penyuluhan	Urusan Pertanian	DPKK/DISTAN

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Rata-Rata Laju Pertumbuhan (GR)		Target Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Utama	
				GR (%)	Periode Waktu GR	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
3. Meningkatnya ketahanan pangan yang berbasis pemberdayaan masyarakat	- PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Rp. Juta	6.868.630	10,54	Tahun 2013-2015	1.382.532	1.573.590	1.787.538	2.025.132	2.285.419	2.572.186	2.572.186					
	- PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Rp. Juta	5.062.493	2,72	Tahun 2013-2015	5.191.009	5.319.382	5.452.570	5.590.722	5.728.569	5.871.434	5.871.434					
	- Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	24,04	-1,54		23,78	23,52	23,27	23,01	22,77	22,52	22,52					
	- Nilai Tukar Petani	Indeks	-	-	-	102,32	102,46	102,60	102,75	102,89	103,04	103,04					
	- Ketersediaan energi dan protein perkapita	%	78,00	40,53	Tahun 2011-2015	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
	- Penguatan cadangan pangan	%	42,80	10,63	Tahun 2011-2015	70,00	75,18	80,73	86,70	93,11	100,00	100,00					
	- Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	%	82,00	3,15	Tahun 2011-2015	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
	- Stabilitas harga dan pasokan pangan	%	84,00	-4,27	Tahun 2011-2015	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
	- Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	70,10	0,00	Tahun 2011-2015	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
	- Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	100,00	59,68	Tahun 2011-2015	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
	- Penanganan daerah rawan pangan	%	40,00	16,89	Tahun 2011-2015	70,00	75,18	80,73	86,70	93,11	100,00	100,00					
														- Meningkatkan SDM, sarana dan prasarana serta melakukan diversifikasi untuk peningkatan ketahanan pangan			
														- Diarahkan pada pengembangan diversifikasi sarana dan prasarana ketahanan pangan untuk mencapai swasembada pangan			
															Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Urusan Ketahanan Pangan	DPKK

**MATRIKS KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG PERIODE 2016-2021 (MISI-4)**

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Rata-Rata Laju Pertumbuhan (GR)		Target Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Utama
				GR (%)	Periode Waktu GR	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
1. Meningkatnya pengelolaan dan produk maritimibisnis	- PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Rp. Juta	6.868.629,99	10,54	Tahun 2013-2015	1.382.531,91	1.573.590,44	1.787.537,63	2.025.131,52	2.285.419,10	2.572.185,98	2.572.185,98				
	- PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Rp. Juta	5.062.493,47	2,72	Tahun 2013-2015	5.191.009,16	5.319.382,33	5.452.569,70	5.590.722,43	5.728.568,90	5.871.434,27	5.871.434,27				
	- Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	24,04	-1,54	Tahun 2013-2015	23,78	23,52	23,27	23,01	22,77	22,52	22,52				
	- PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan	Rp. Juta	1.188.021,27	6,01	Tahun 2013-2015	7.382.438,03	8.012.362,15	8.678.971,66	9.375.847,35	10.089.446,99	10.827.996,18	10.827.996,18				
	- PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan	Rp. Juta	1.048.398,11	4,26	Tahun 2013-2015	1.091.189,57	1.135.001,07	1.180.926,71	1.229.069,12	1.278.324,68	1.329.921,15	1.329.921,15				
	- Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Industri Pengolahan	%	0,74	-0,50	Tahun 2013-2015	0,74	0,74	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73				
													- Peningkatan pengelolaan dengan memperhatikan <i>pro growth, pro job, pro poor and pro environment</i>)			
													- Diarahkan pada peningkatan ketersediaan produk kelautan dan perikanan yang berkelanjutan			
														Program Pengelolaan, Pemanfaatan, Pemasaran dan Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
													- Diarahkan pada peningkatan, pemanfaatan serta pembinaan kehandalan nelayan dan pembudidaya serta pengoptimalan nilai tambahnya			
														Program Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya	Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
														Program Pembinaan dan SDM Kemaritiman	Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
														Program Pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap	Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
2. Meningkatnya sarana dan prasarana maritimibisnis	- PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Rp. Juta	6.868.630	10,54	Tahun 2013-2015	1.382.532	1.573.590	1.787.538	2.025.132	2.285.419	2.572.186	2.572.186				
	- PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Rp. Juta	5.062.493	2,72	Tahun 2013-2015	5.191.009	5.319.382	5.452.570	5.590.722	5.728.569	5.871.434	5.871.434				
	- Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	24,04	-1,54	Tahun 2013-2015	23,78	23,52	23,27	23,01	22,77	22,52	22,52				

**MATRIKS KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG PERIODE 2016-2021 (MISI-5)**

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Rata-Rata Laju Pertumbuhan (GR)		Target Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Utama	
				GR (%)	Periode Waktu GR	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
1. Meningkatnya kualitas kawasan/destinasi wisata	- Jumlah Wisatawan	Orang	3.362.231	13,44	Tahun 2011-2015	3.836.537	4.377.753	4.995.318	5.700.002	6.504.095	7.421.621	7.421.621					
	- Rata-rata Lama Kunjungan Wisatawan	Hari	-	-	-	1,10	1,16	1,21	1,27	1,34	1,40	1,40					
	- PDRB ADHB Sektor Jasa Lainnya	Rp. Juta	217.637	14,42	Tahun 2013-2015	369.759	432.888	505.800	589.409	684.178	792.037	792.037					
	- PDRB ADHK Sektor Jasa Lainnya	Rp. Juta	168.680	8,03	Tahun 2013-2015	181.911	196.055	211.361	227.929	245.632	264.784	264.784					
	- Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Jasa Lainnya	%	2,93	-0,10	Tahun 2013-2015	2,93	2,93	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92					
													- Pengembangan pariwisata unggulan melalui keberagaman objek/destinasi wisata				
													- Diarahkan untuk pengembangan Atraksi wisata alam (seperti Tahura) , wisata buatan (agrowisata), minat khusus				
													- Diarahkan untuk mengembang agro wisata				
														Program Konservasi Keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan	Urusan Kehutanan		DISTAN
														Program Pengembangan agro wisata	Urusan Pariwisata		DISPAR
													- Perluasan Potensi Kawasan Pariwisata				
													- Diarahkan untuk menggali Potensi Wisata				
													- Diarahkan untuk mendorong modernisasi wisata air				
													- Diarahkan untuk mendorong internasionalisasi / tujuan wisata dunia KEK Tj. Lesung				
														Program Penciptaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata	Urusan Pariwisata		DISPAR
														Program Peningkatan Produk Pariwisata Unggulan	Urusan Pariwisata		DISPAR
														Program sarana dan prasarana wisata	Urusan Pariwisata		DISPAR
														Program peningkatan iklim investasi pariwisata	Urusan Pariwisata		DISPAR

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Pertumbuhan (GR)		Target Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Utama		
				GR (%)	Periode Waktu GR	2016	2017	2018	2019	2020	2021							
2. Menguatnya SDM Pelaku/masyarakat Wisata	- Jumlah Wisatawan	Orang	3.362.231	13,44	Tahun 2011-2015	3.836.537	4.377.753	4.995.318	5.700.002	6.504.095	7.421.621	7.421.621						
	- Rata-rata Lama Kunjungan Wisatawan	Hari	-	-	-	1,10	1,16	1,21	1,27	1,34	1,40	1,40						
	- PDRB ADHB Sektor Jasa Lainnya	Rp. Juta	217.637	14,42	Tahun 2013-2015	369.759	432.888	505.800	589.409	684.178	792.037	792.037						
	- PDRB ADHK Sektor Jasa Lainnya	Rp. Juta	168.680	8,03	Tahun 2013-2015	181.911	196.055	211.361	227.929	245.632	264.784	264.784						
	- Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Jasa Lainnya	%	2,93	-0,10	Tahun 2013-2015	2,93	2,93	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92						
														- Pengembangan Kualitas/ kompetensi stakeholder (pelaku usaha), masyarakat dan tenaga kerja kepariwisataan				
														- Diarahkan untuk mendirikan pusat pelatihan SDM pariwisata				
														- Diarahkan untuk mendorong terlaksananya Festival Layar / Sail Tanjung Lesung atau Sail Ujung Kulon				
														- Diarahkan pada peningkatan sadar wisata masyarakat				
														- Diarahkan pada Digitalisasi dan Promosi pariwisata				
														Program Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Pariwisata	Urusan Pariwisata		DISPAR	
														Program Pengembangan Informasi dan Promosi Pariwisata	Urusan Pariwisata		DISPAR	
														Program pengembangan tenaga kerja kepariwisataan	Urusan Pariwisata		DISPAR	
														Program pengembangan partisipasi kepariwisataan masyarakat	Urusan Pariwisata		DISPAR	
3. Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Objek Wisata	- Jumlah Wisatawan	Orang	3.362.231	13,44	Tahun 2011-2015	3.836.537	4.377.753	4.995.318	5.700.002	6.504.095	7.421.621	7.421.621						
	- Rata-rata Lama Kunjungan Wisatawan	Hari	-	0,00	-	1,10	1,16	1,21	1,27	1,34	1,40	1,40						
	- PDRB ADHB Sektor Jasa Lainnya	Rp. Juta	217.637	14,42	Tahun 2013-2015	369.759	432.888	505.800	589.409	684.178	792.037	792.037						
	- PDRB ADHK Sektor Jasa Lainnya	Rp. Juta	168.680	8,03	Tahun 2013-2015	181.911	196.055	211.361	227.929	245.632	264.784	264.784						
	- Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Jasa Lainnya	%	2,93	-0,10	Tahun 2013-2015	2,93	2,93	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92						
	- Cakupan kajian seni 50%		33,00	26,22	Tahun 2011-2015	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
	- Cakupan fasilitas seni 30%		57,00	0,00	Tahun 2011-2015	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
	- Cakupan gelar seni 75%		100,00	7,46	Tahun 2011-2015	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
	- Misi kesenian 100%		100,00	0,00	Tahun 2011-2015	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
	- Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian 25%		63,00	13,47	Tahun 2011-2015	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
	- Cakupan tempat 100%		100,00	-	Tahun 2011-2015	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Pertumbuhan (GR)		Target Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Utama	
				GR (%)	Periode Waktu GR	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
	- Cakupan organisasi 34%		33,00	-	Tahun 2011-2015	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
													- Pengembangan Kualitas/ kompetensi stakeholder (pelaku usaha), masyarakat dan tenaga kerja kepariwisataan				
													- Diarahkan untuk mendorong modernisasi pengelolaan obyek - obyek wisata				
													- Diarahkan untuk memodernisasi pengelolaan obyek wisata ziarah dan religi				
													- Diarahkan pada pengembangan paket - paket wisata alam ke TNUK dan Akarsari				
													- Diarahkan pada pelestarian seni budaya dan nilai-nilai kearifan lokal				
														Program Pengembangan Manajemen Kepariwisata	Urusan Pariwisata		DISPAR
														Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Urusan Pariwisata		DISPAR
														Program Pengembangan Usaha Pariwisata	Urusan Pariwisata		DISPAR

**MATRIKS KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG PERIODE 2016-2021 (MISI-6)**

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Rata-Rata Laju Pertumbuhan (GR)		Target Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Utama	
				GR (%)	Periode Waktu GR	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
1. Peningkatan kelembagaan, jaringan dan budaya inovasi	- PDRB ADHB Sektor Jasa Pendidikan	Rp. Juta	679.765	13,49	Tahun 2013-2015	711.090	799.751	897.700	1.004.946	1.120.646	1.246.287	1.246.287					
	- PDRB ADHK Sektor Jasa Pendidikan	Rp. Juta	527.135	9,01	Tahun 2013-2015	573.644	623.856	678.668	738.511	803.097	873.572	873.572					
	- Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Jasa Pendidikan	%	4,57	1,75	Tahun 2013-2015	4,67	4,78	4,89	5,00	5,11	5,23	5,23					
	Indeks Tingkat Daya Beli / Pengeluaran	Indeks	62,27	0,67	Tahun 2012-2015	62,53	62,80	63,06	63,32	63,59	63,86	63,86					
													- Meningkatkan kapasitas iptekin melalui kerjasama antara pihak kelibangan				
													- Diarahkan pada pengembangan iklim yang kondusif bagi inovasi dan bisnis				
													- Diarahkan untuk memperkuat kelembagaan kelibangan dan daya dukung Inovasi				
													- Diarahkan untuk mendorong budaya inovasi				
													- Diarahkan pada penguatan penelitian dan pengembangan sebagai bahan kebijakan pembangunan				
														Program Penguatan, kelembagaan, Jaringan dan Budaya Inovasi	Penunjang Urusan Pemerintahan	BAPPEDA	
														Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK	Penunjang Urusan Pemerintahan	BAPPEDA	
2. Peningkatan inovasi pada sektor agro, maritim dan wisata	- PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Rp. Juta	6.868.630	10,54	Tahun 2013-2015	1.382.532	1.573.590	1.787.538	2.025.132	2.285.419	2.572.186	2.572.186					
	- PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan	Rp. Juta	1.188.021	6,01	Tahun 2013-2015	7.382.438	8.012.362	8.678.972	9.375.847	10.089.447	10.827.996	10.827.996					
	- PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Rp. Juta	5.062.493	2,72	Tahun 2013-2015	5.191.009	5.319.382	5.452.570	5.590.722	5.728.569	5.871.434	5.871.434					
	- PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan	Rp. Juta	1.048.398	4,26	Tahun 2013-2015	1.091.190	1.135.001	1.180.927	1.229.069	1.278.325	1.329.921	1.329.921					
	- Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	24,04	-1,54	Tahun 2013-2015	23,78	23,52	23,27	23,01	22,77	22,52	22,52					
	- Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Industri Pengolahan	%	0,74	-0,50	Tahun 2013-2015	0,74	0,74	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73					
	- Nilai Tukar Petani	Indeks	-	-	-	102,32	102,46	102,60	102,75	102,89	103,04	103,04					

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Rata-Rata Laju Pertumbuhan (GR)		Target Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Utama
				GR (%)	Periode Waktu GR	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
													- Melibatkan secara aktif peran praktisi, pakar dan organisasi / profesi kelitbangan guna berkolaborasi dengan aparaturn pemerintah			
													- Diarahkan untuk menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi			
													- Diarahkan pada penyeselarasan lptekin dengan perkembangan global			
													- Diarahkan untuk meningkatkan pengembangan inovasi dan penguasaan Teknologi Industri melalui peningkatan sarana dan prasarana industri dan KUMKM			
													- Diarahkan untuk mengembangkan kemampuan absorpsi inovasi oleh industri, khususnya KUMKM			
													- Diarahkan untuk menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, serta meningkatkan pelayanan berbasis teknologi			
													- Diarahkan untuk mendorong pembangunan kluster inovasi sebagai centre of excellence atau Technology Park dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan berinovasi untuk meningkatkan daya saing			

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Rata-Rata Laju Pertumbuhan (GR)		Target Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Utama
				GR (%)	Periode Waktu GR	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
														Program Peningkatan Penerapan Teknologi Tepat Guna	Penunjang Urusan Pemerintahan	Semua Perangkat Daerah
3. Terciptanya birokrasi yang bersih dan melayani	- Implementasi Maturitas Level SPIP	Level	-	-	-	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3				
	- Kapabilitas APIP	Level	-	-	-	Level 2	Level 2	Level 3 D Cl	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3				
	- Opini LKD	Tingkat	WDP	-	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP				
	- Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Publik	%	65,50	-	-	67,47	70,84	74,38	78,10	82,00	86,10	86,10				
	- Rata-rata Tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal	%	64,48	-	-	72,64	77,11	81,59	86,06	90,53	95,00	95,00				
	- PDRB ADHB Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Rp. Juta	1.262.667	15,77	Tahun 2013-2015	442.603	496.614	556.123	621.094	690.969	766.625	766.625				
	- PDRB ADHK Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Rp. Juta	900.784	10,06	Tahun 2013-2015	989.630	1.086.543	1.193.306	1.310.942	1.439.217	1.580.481	1.580.481				
	- Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	%	13,61	2,01	Tahun 2013-2015	13,96	14,33	14,70	15,09	15,48	15,89	15,89				
														- Menguatnya sistem dan peningkatan kualitas pelayanan publik		
														- Diarahkan pada penguatan manajemen dan sistem pelayanan publik daerah		
														Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Penunjang Urusan Pemerintahan	SETDA/KECAMATAN
														Program Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Penunjang Urusan Pemerintahan	SETDA/BAPPEDA
														Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	SETDA
														- Diarahkan pada pelayanan prima administrasi kependudukan		
														Program Penataan Administrasi Kependudukan	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DAKPS
														- Diarahkan pada penyelesaian konflik pertanahan di daerah		
														- Diarahkan pada kesadaran masyarakat akan arti pentingnya wawasan kebangsaan		

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Rata-Rata Laju Pertumbuhan (GR)		Target Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Utama
				GR (%)	Periode Waktu GR	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
														Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Urusan Pertanahan	SETDA
														Program Pemantapan Wawasan Kebangsaan	Urusan Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	KESBANGPOL
														Program Fasilitas Pembinaan Ketahanan dan Kewaspadaan Masyarakat	Urusan Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	KESBANGPOL
													- Diarahkan pada pengembangan sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan publik			
														Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	BAPPEDA/SETDA/IN SPEKTORAT
														- Diarahkan pada penerapan standar pelayanan minimal (SPM) pelayanan publik		
														Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penunjang Urusan Pemerintahan	Semua Perangkat Daerah
														- Penataan sistem dan prosedur serta kelembagaan investasi daerah		
														- Diarahkan pada Pelayanan perizinan satu Pintu		
														- Diarahkan pada penguatan investasi dan penanaman modal		
														Program Peningkatan Informasi Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal	Urusan Penanaman Modal	DPMPSTP
														Program Penguatan Layanan Kawasan Ekonomi Khusus	Urusan Penanaman Modal	ADMINISTRATOR KEK

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Rata-Rata Laju Pertumbuhan (GR)		Target Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Utama
				GR (%)	Periode Waktu GR	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
													- Diarahkan pada Jaminan kepastian hukum dan keamanan atas investasi yang dilakukan			
													- Diarahkan pada Pemberian stimulan bagi investor			
													- Diarahkan pada jaminan penyediaan infrastruktur dasar penunjang investasi			
														Program Pengendalian dan Pengawasan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal	Urusan Penanaman Modal	DPMPTSP
														Program Penyiapan dan Peningkatan Investasi	Urusan Penanaman Modal	DPMPTSP
													- Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kelembagaan dan kinerja aparatur			
													- Diarahkan pada penataan kelembagaan instansi pemerintah daerah			
														Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	SET DPRD
														Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	SETDA
														Program Pengembangan Otonomi Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	SETDA
														Program Penataan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	SETDA
														Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Kecamatan, Desa, dan Kelurahan	Penunjang Urusan Pemerintahan	SETDA
														Program peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Penunjang Urusan Pemerintahan	SETDA

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Rata-Rata Laju Pertumbuhan (GR)		Target Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Utama
				GR (%)	Periode Waktu GR	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
													- Diarahkan pada pengembangan sistem ketatalaksanaan untuk mendukung peningkatan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam proses kerja pemerintahan daerah			
														Program Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	SETDA
													- Diarahkan pada peningkatan akuntabilitas perencanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah daerah			
														Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi	Penunjang Urusan Pemerintahan	INSPEKTORAT
														Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan, Sistem dan Prosedur Pengawasan	Penunjang Urusan Pemerintahan	INSPEKTORAT
													- Diarahkan pada pendidikan dan pelatihan bagi aparatur			
													- Diarahkan pada Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
														Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Penunjang Urusan Pemerintahan	BK DIKLAT
														Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	BK DIKLAT
														Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Penunjang Urusan Pemerintahan	DPMPD

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Rata-Rata Laju Pertumbuhan (GR)		Target Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Utama
				GR (%)	Periode Waktu GR	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
														Program Pengelolaan Penganggaran Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	BPKD
														Program Peningkatan Layanan Perbendaharaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	BPKD
													- Diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan tata kelola asset daerah			
														Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	BPKD
5. Tersedianya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah	- PDRB ADHB Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi	Rp. Juta	493.250	8,97	Tahun 2013-2015	641.976	723.313	813.356	912.158	1.018.999	1.135.275	1.135.275				
	- PDRB ADHB Sektor Jasa Perusahaan	Rp. Juta	45.984	11,16	Tahun 2013-2015	242.025	281.486	326.738	378.249	436.184	501.633	501.633				
	- PDRB ADHK Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi	Rp. Juta	402.940	4,30	Tahun 2013-2015	419.543	436.551	454.385	473.086	492.229	512.288	512.288				
	- PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Rp. Juta	6.868.630	10,54	Tahun 2013-2015	1.382.532	1.573.590	1.787.538	2.025.132	2.285.419	2.572.186	2.572.186				
	- PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Rp. Juta	5.062.493	2,72	Tahun 2013-2015	5.191.009	5.319.382	5.452.570	5.590.722	5.728.569	5.871.434	5.871.434				
	- PDRB ADHK Sektor Jasa Perusahaan	Rp. Juta	38.803	6,65	Tahun 2013-2015	41.312	43.955	46.781	49.803	52.986	56.387	56.387				
	- Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi	%	3,68	-1,81	Tahun 2013-2015	3,63	3,59	3,54	3,50	3,45	3,41	3,41				
	- Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Jasa Perusahaan	%	0,94	-3,74	Tahun 2013-2015	0,91	0,89	0,87	0,84	0,82	0,80	0,80				
	- Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	24,04	-1,54	Tahun 2013-2015	23,78	23,52	23,27	23,01	22,77	22,52	22,52				
	- Kemampuan Investasi	Rp. Miliar	703,94	2,43	Tahun 2000-2009	632,13	636,56	641,01	645,50	650,02	659,12	659,12				
														- Merestrukturisasi, penguatan permodalan dan perbaikan manajemen dan peningkatan kerjasama Badan Usaha Milik Daerah		
														- Diarahkan pada pembangunan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah khususnya pada sektor pariwisata, agribisnis dan aquaindustri		
														Program Fasilitas pembentukan dan penguatan modal BUMD/BLUD	Penunjang Urusan Pemerintahan	SETDA/BAPPEDA/D PMPTSP
6. Terciptanya masyarakat yang demokratis	- Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Publik	%	65,50	-	-	67,47	70,84	74,38	78,10	82,00	86,10	86,10				
	- Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media baru seperti website (media online)	hari	365,00	-	-	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00				

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Rata-Rata Laju Pertumbuhan (GR)		Target Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Utama	
				GR (%)	Periode Waktu GR	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
	- Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya	kegiatan	10,00	-	-	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00					
	- Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media luar ruang seperti buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho	kegiatan	12,00	-	-	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00					
	- Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi di tingkat kecamatan	%	23,00	-	-	70,00	76,00	82,00	88,00	94,00	100,00	100,00					
	- Tidak terjadinya konflik bernuansa suku, ras dan antargolongan, konflik politik, konflik perebutan sumber daya alam, diskriminasi, dan kekerasan lain yang merusak fasilitas publik, serta tindakan terorisme	Kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	- Tingkat Partisipasi Politik Pemilu	%	56,88	4,18	2011-2015	-	62,92	-	68,96	-	75,00	75,00					
													- Meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi masyarakat				
													- Diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam rangka pembangunan daerah				
														Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan			
														Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Urusan Pemberdayaan Masyarakat		DPMPD
													- Diarahkan pada peningkatan pemahaman organisasi masyarakat dan politik dalam berorganisasi				
														Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik	Urusan Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		KESBANGPOL
7.	Terciptanya Supremasi hukum	Level	-	-	-	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3					
	- Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota	%	70,00	-	-	92,50	93,95	95,43	96,93	98,45	100,00	100,00					
	- Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di kabupaten/ Kota	%	-	-	-	80,00	83,65	87,47	91,46	95,64	100,00	100,00					
	- Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota	%	100,00	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
	- Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Patroli/hari/orang	33,33	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Rata-Rata Laju Pertumbuhan (GR)		Target Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Utama	
				GR (%)	Periode Waktu GR	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
													- Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan supremasi hukum				
													- Diarahkan pada penegakan hukum yang berkeadilan dimasyarakat tanpa memandang status, suku, ras dan agama				
														Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Urusan Ketentraman, ketertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat		SATPOL PP
														Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Urusan Ketentraman, ketertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat		SALPOL PP/BPBD
														Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Urusan Ketentraman, ketertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat		SATPOL PP
													- Diarahkan pada peningkatan kesadaran akan arti pentingnya penegakan hukum				
													- Diarahkan pada optimalisasi lembaga penegakan hukum				
														Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Penunjang Urusan Pemerintahan		SETDA
														Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Penunjang Urusan Pemerintahan		SETDA
8. Pengurangan Risiko Bencana	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	1,26	-	-	92,50	93,95	95,43	96,93	98,45	100,00	100,00					
	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	0,06	-	-	80,00	83,65	87,47	91,46	95,64	100,00	100,00					
	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	%	0,10	-	-	98,75	99,00	99,25	99,50	99,75	100,00	100,00					
	Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000 - 5000 liter pada WMK	%	0,06	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
	Pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial skala provinsi	%	27,47	-	-	90,00	91,92	93,87	95,87	97,91	100,00	100,00					
	Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam panti sosial skala provinsi	%	40,00	-	-	70,00	75,18	80,73	86,70	93,11	100,00	100,00					
	Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala provinsi	%	100,00	-	-	90,00	91,92	93,87	95,87	97,91	100,00	100,00					

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Rata-Rata Laju Pertumbuhan (GR)		Target Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Utama
				GR (%)	Periode Waktu GR	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
	Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala provinsi	%	13,64	-	-	70,00	75,18	80,73	86,70	93,11	100,00	100,00				
	Bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi	%	50,25	-	-	90,00	91,92	93,87	95,87	97,91	100,00	100,00				
	Evakuasi korban bencana skala provinsi	%	50,75	-	-	90,00	91,92	93,87	95,87	97,91	100,00	100,00				
	Penyelenggaraan jaminan sosial skala provinsi	%	15,67	-	-	40,00	44,74	50,04	55,96	62,59	70,00	70,00				
													- Meningkatkan Kapasitas Kesiap siagaan Aparat, Dunia Usaha dan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Pra Bencana, Saat Bencana dan Pasca Bencana			
													- Diarahkan pada Kesiapsiagaan, pencegahan (Pra Bencana), Tanggap Darurat (Saat Bencana) dan Rehabilitasi, Rekonstruksi (Pasca Bencana)			
														Program Pencegahan Dini dan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Penunjang Urusan Pemerintahan	BPBD
														Program Peningkatan Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Penunjang Urusan Pemerintahan	BPBD

Keterangan : Indikator sasaran strategis tersebut bersifat makro, agar lebih SMART (*Specific, Measurable, Acceptable, Realistic, Timebound*) dapat ditambahkan /dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama Lima Tahunan dan Tahunan.